



PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBRANA

PROFIL

BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN
JEMBRANA



2026



www.jembranakab.go.id



bagpemerintahan.jembrana@gmail.com



Jalan Surapati No. 1 Negara, Bali

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Profil Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen profil ini disusun sebagai gambaran umum mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya aparatur, program dan kegiatan, serta dukungan anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana. Profil ini diharapkan dapat menjadi media informasi sekaligus referensi bagi perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam memahami peran strategis Bagian Pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, Bagian Pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam pengoordinasian, fasilitasi, serta pembinaan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama daerah, dan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, penyusunan profil ini menjadi penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih dapat disempurnakan. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga profil ini dapat memberikan manfaat dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Jembrana, 2 Januari 2026

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

Kepala Bagian Pemerintahan,



I Dewa Putu Eka Adi Putra, M.Pd.

Penata Tingkat I/III d

NIP 19840927 201101 1 006

A. GAMARAN UMUM

Bagian Pemerintahan merupakan salah satu bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Keberadaan Bagian Pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bagian Pemerintahan berfungsi sebagai unsur staf yang membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peran ini sangat penting dalam memastikan terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar Perangkat Daerah.

Secara substansial, ruang lingkup tugas Bagian Pemerintahan mencakup fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan administrasi kecamatan dan kelurahan, penegasan batas wilayah, toponimi dan kode wilayah, penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), fasilitasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), fasilitasi proses administrasi kepala daerah dan DPRD, koordinasi pelaksanaan Pemilihan Umum, serta pengelolaan kerja sama daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Pemerintahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Dengan dukungan sumber daya aparatur yang kompeten dan sistem kerja yang terkoordinasi, Bagian Pemerintahan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jembrana.

Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan juga berperan dalam memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah

dengan instansi vertikal, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung terciptanya stabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat, Bagian Pemerintahan merupakan salah satu dari delapan bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana yang berkedudukan di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bersama dua bagian lainnya, antara lain Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Secara parsial/sebagian dari struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana yang menggambarkan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana, sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana



C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, serta pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama, dan otonomi daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama, dan otonomi daerah;
2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama, dan otonomi daerah;

3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama, dan otonomi daerah;
4. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama, dan otonomi daerah;
5. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama, dan otonomi daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Secara detail, Bagian Pemerintahan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kesatuan bangsa dan politik;
2. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kesatuan bangsa dan politik;
3. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kesatuan bangsa dan politik;
4. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan

- pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kesatuan bangsa dan politik;
5. menyusun bahan kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan pada kecamatan dan kelurahan;
 6. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
 8. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
 9. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
 10. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
 11. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
 12. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Perangungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
 13. menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
 14. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 15. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 16. memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 17. menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
 18. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;

19. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD;
20. mengoordinasikan pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional serta peringatan hari-hari bersejarah nasional dan daerah.
21. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama daerah;
22. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah;
23. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah;
24. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
25. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
26. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah.

D. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana merupakan unsur pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Aparatur yang ada terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki.

Komposisi sumber daya aparatur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana terdiri 6 (enam) orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Gambaran komposisi sumber daya aparatur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Gambaran Sumber Daya Aparatur
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana

No	Nama	NIP/NIPPK	Pangkat/ Golongan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Jabatan/Status ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	I Dewa Putu Eka Adi Putra, M.Pd.	198409272011011006	Penata Tingkat I/III d	Magister (S2)	Laki-Laki	Kepala Bagian/PNS
2	Arie Siswoyo, S.Sos., M.M.	198101182006041008	Penata Tingkat I/III d	Magister (S2)	Laki-Laki	Analisis Kebijakan Ahli Muda/PNS
3	Ni Wayan Kertasari, S.IP.	197705172007012024	Penata Muda Tingkat I/III b	Sarjana (S1)	Perempuan	Pengadministrasian Perkantoran/PNS
4	I Ketut Ardana	197210232006041010	Penata Muda/III a	SMA/ Sederajat	Laki-Laki	Pengelola Layanan Operasional/PNS
5	Ni Kade Sekarini	197209302006042021	Penata Muda/III a	SMA/ Sederajat	Perempuan	Pengolah Data Informasi/PNS
6	Ngurah Gede Yudha Angkasa	197412282006041015	Penata Muda/III a	SMA/ Sederajat	Laki-Laki	Pengelola Layanan Operasional/PNS
7	I Gede Nata Antara, S.T.	198505202025211005	IX	Sarjana (S1)	Laki-Laki	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/PPPK
8	I Putu Agus Suriadnyana, S.E.	198808052025211009	IX	Sarjana (S1)	Laki-Laki	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/PPPK
9	Nacha Derartu Wijayanti	-	-	Diploma 1	Perempuan	Operator Layanan Operasional/PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan tabel di atas, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana memiliki total 9 orang aparatur yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai didominasi oleh laki-laki sebanyak 6 orang, sedangkan perempuan berjumlah 3 orang.

Dari sisi pendidikan, sebagian besar aparatur memiliki kualifikasi pendidikan tinggi. Terdapat 2 orang berpendidikan Magister (S2), 3 orang berpendidikan Sarjana (S1), 3 orang lulusan SMA/ sederajat, dan 1 orang lulusan Diploma I. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berdasarkan kepangkatan, PNS yang ada menduduki golongan Penata Tingkat I (III/d), Penata Muda Tingkat I (III/b), dan Penata Muda (III/a). Selain itu, terdapat 2 orang PPPK dengan golongan IX dan 1 orang PPPK Paruh Waktu. Struktur jabatan menunjukkan adanya variasi peran, mulai dari Kepala Bagian, Analisis Kebijakan Ahli Muda, Pengadministrasian Perkantoran, Pengelola Layanan Operasional, Pengelola Data dan Informasi, hingga Operator Layanan Operasional.

Secara umum, komposisi sumber daya aparatur pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana telah mencerminkan kombinasi antara pejabat administrator, jabatan fungsional, serta jabatan pelaksana. Dengan latar belakang pendidikan dan kepangkatan

yang beragam, kondisi ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara administratif, teknis, dan operasional.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Bagian Pemerintahan disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana serta mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jembrana. Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan 2 (dua) kegiatan, antara lain:

- a. Administrasi Tata Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, antara lain:
 1. Penataan Administrasi Pemerintahan
 2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- b. Fasilitasi Kerja Sama Daerah, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, antara lain:
 1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 2. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
 3. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. ANGGARAN

Anggaran Bagian Pemerintahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana yang dialokasikan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan. Pada Tahun 2026, alokasi anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana untuk 6 (enam) subkegiatan sebesar Rp1.910.059.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana

No	Subkegiatan	Anggaran 2026 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	18.820.350,00	21.341.700,00	- 2.521.350,00
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1.526.050,00	2.375.750,00	- 849.700,00
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	623.150,00	970.100,00	- 346.950,00
4	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.845.627.800,00	1.621.439.600,00	224.188.200,00
5	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	11.374.000,00	93.384.200,00	-82.010.200,00
6	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	32.088.450,00	24.975.250,00	7.113.200,00
Total		1.910.059.800,00	1.764.486.600,00	145.573.200,00

Tabel 2 menyajikan perbandingan anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Jembrana Tahun 2025 dan Tahun 2026. Secara umum, total anggaran pada Tahun 2026 sebesar Rp1.910.059.800,00 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2025 yang sebesar Rp1.764.486.600,00. Dengan demikian, terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp145.573.200,00 atau secara nominal menunjukkan adanya penguatan alokasi belanja pada tahun 2026.

Pada subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri, anggaran Tahun 2026 sebesar Rp18.820.350,00 menurun dibandingkan Tahun 2025 sebesar Rp21.341.700,00, sehingga terdapat selisih penurunan Rp2.521.350,00. Hal yang sama juga terjadi pada Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri yang mengalami penurunan dari Rp2.375.750,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp1.526.050,00 pada Tahun 2026 atau berkurang Rp849.700,00. Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama juga mengalami penurunan anggaran sebesar Rp346.950,00, dari Rp970.100,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp623.150,00 pada Tahun 2026.

Di sisi lain, Penataan Administrasi Pemerintahan mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan. Pada Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp1.845.627.800,00, meningkat dari

Rp1.621.439.600,00 pada Tahun 2025, atau bertambah Rp224.188.200,00. Sementara itu, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan justru mengalami penurunan cukup besar dari Rp93.384.200,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp11.374.000,00 pada Tahun 2026, sehingga berkurang Rp82.010.200,00. Adapun Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah mengalami kenaikan dari Rp24.975.250,00 pada Tahun 2025 menjadi Rp32.088.450,00 pada Tahun 2026 atau meningkat sebesar Rp7.113.200,00.

Secara keseluruhan, peningkatan total anggaran Tahun 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan pada subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah, meskipun beberapa subkegiatan lainnya mengalami penurunan alokasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas anggaran yang lebih difokuskan pada penguatan fungsi administrasi pemerintahan pada Tahun 2026.

G. PENUTUP

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama daerah, dan otonomi daerah.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional, terkoordinasi, dan berorientasi pada pelayanan publik, Bagian Pemerintahan diharapkan mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta terciptanya stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jembrana.

Demikian gambaran umum mengenai tugas, fungsi, sumber daya, program, dan anggaran Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.